



JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN  
(JAK)

P- ISSN: 2301-4717 E-ISSN: 2716-022X  
Homepage: <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jak/index>



**Pengaruh Komitmen Organisasi, Transparansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Varibel Moderasi**

Kukuh Iqnatul Pribadi<sup>1\*</sup>, Selamat Eko Budi Santoso<sup>2</sup>, Novi Dirgantari<sup>3</sup>, Annisa Ilma Hartikasari<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Banyumas, Indonesia.

\*Corresponding author: [kukuhiqnatul@gmail.com](mailto:kukuhiqnatul@gmail.com) | Phone Number: [082136891169](tel:082136891169)

DOI: <https://doi.org/10.29103/jak.v13i1.18193>

**ARTICLE INFO**

Received: 18-12-2024

Received in revised: 15-01-2025

Accepted: 10-02-2025

Available online: 21-03-2025

**KEYWORDS**

Accountability Of  
Village Funds,  
Organizational  
Commitment,  
Transparency, Use Of  
Information  
Technology, Community  
Participation

**ABSTRACT**

*In order to examine the moderating influence, this paper objective to evaluate impact of organisational commitment, transparency, and information technology on civic engagement. The framework was build on stewardship filosohphy. Therefore SEM PLS was used as analytical approach. The research population comprises of the village equipment spread throughout twenty Cilongok District villages. With purposive sampling techinque, the sample size came out to be 135 respondent. The result shown that responsibility of village funds is significantly influeced by organisational commitment and transparency. Nonetheless, the responsibility of village finance management isn't influenced usage information technology. In terms of organisational commitment, transparency, and IT use, this study demonstrates that community engagement has minimal impact on the accountability of village finance.*

**PENDAHULUAN**

Guna mempercepat pembangunan nasional, pemerintah Indonesia memprioritaskan transfer keuangan desa dari tingkat pusat ke tingkat daerah. Pemerintah Indonesia berdedikasi untuk membantu daerah pedesaan mencapai potensi penuh yang dimilikinya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sumber pendanaan besar yang dibutuhkan untuk upaya ini (Yusnita & Salfutra, 2021). Pemerintah pusat diyakini dapat memenuhi kewajibannya dengan lebih baik kepada seluruh masyarakat dengan bantuan otonomi yang diberikan kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan daerah.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023, seluruh tahapan yang meliputi proses perencanaan anggaran, alokasi, distribusi, administrasi, hingga pertanggungjawaban, pelaporan, penggunaan, pemantauan, evaluasi, serta penghentian atau penundaan distribusi Dana Desa telah diatur dalam peraturan tersebut dan berlaku lebih dari satu tahun. Sebaliknya, PMK Nomor 146 Tahun 2023 menjabarkan secara spesifik Dana Desa masing-masing desa untuk Tahun Anggaran 2024 dan bagaimana Dana Desa tersebut akan didistribusikan dan digunakan sesuai dengan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 ([djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id)). Jika dikelola dengan baik, Dana Desa dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan masyarakat desa, yang merupakan komponen penting dalam pembangunan di tingkat lokal. Oleh karena itu,

mengetahui seluk beluk pengelolaan Dana Desa sangatlah penting.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37/2003 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, inisiatif Dana Desa harus digunakan untuk mendanai inisiatif pembangunan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Supaya bisa mendorong partisipasi aktif warga desa, pengambilan keputusan melalui musyawarah desa, pengembangan program hingga kegiatan yang sesuai kewenangannya, Dana Desa disusun secara terstruktur. Tujuan dari penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yakni meningkatkan kualitas hidup, meminimalisir kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan ini, perlu digarisbawahi bahwa sangat penting bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat untuk memaksimalkan pemanfaatan Dana Desa sesuai keutamaan yang telah ditentukan secara efektif, efisien, dan transparan. Fenomena yang terjadi di Kecamatan Cilongok menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai kekurangan dan tantangan, terutama terkait dengan tuntutan akuntabilitas yang menuntut pemerintah desa untuk melakukan pertanggungjawabannya perihal pengelolaan dana tersebut.

Tujuan dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah untuk mempercepat pembangunan di desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, hingga menjamin pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Pemahaman terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan efektivitas dana desa memiliki urgensi tersendiri, untuk mendukung pembangunan masyarakat secara berkelanjutan melalui strategi yang tepat (Budiati, 2019). Oleh karena itu, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, sangat penting untuk mengetahui apa yang membuat dana desa berhasil. Dengan menerapkan prosedur yang tepat, keuangan desa dapat dikelola secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan di tingkat lokal. Karena pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu prioritas utama pemanfaatan dana desa, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan agar bisa mengelola dana desa dengan baik. Pencapaian pemberdayaan masyarakat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan desa (Sundanah dkk., 2020).

Di Kecamatan Cilongok sendiri, perihal pengelolaan dana desa masih menemui sejumlah hambatan ataupun kekurangan akibat tuntutan akuntabilitas yang mewajibkan pemerintah desa menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana tersebut ([www.satelitpost.com](http://www.satelitpost.com)). Kecamatan ini adalah sebuah wilayah dengan area terluas di Kabupaten Banyumas dan di isi oleh 20 desa menjadikan kecamatan dengan jumlah anggaran dana desa paling besar di Kabupaten Banyumas menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas. Dalam hal pengembangan masyarakat, pengelolaan keuangan desa sangatlah penting. Akuntabilitas ini, transparansi, penggunaan TI, dan pelibatan masyarakat merupakan faktor-faktor yang telah terbukti mempengaruhi pengelolaannya dalam berbagai penelitian. Menurut penelitian Hasanah (2022), pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh akuntabilitas, keterbukaan, dan pelibatan masyarakat. Di sisi lain, penelitian Putri Thalia Nadia (2023) memverifikasi bahwa keterbukaan dan tanggung jawab berdampak pada kepatuhan terhadap aturan dalam administrasi keuangan desa. Meskipun ada beberapa dampak baik dari penggunaan TI, penelitian oleh Alfa Forna Regga (2023) menemukan bahwa tidak ada pengaruh substansial terhadap akuntabilitas administrasi anggaran desa.

Komitmen organisasi bisa diartikan sebagai perilaku seseorang terhadap organisasi, yang tercermin melalui loyalitas, usaha untuk menggapai visi, misi, nilai, tujuan organisasi, hingga kesediaan untuk melakukan mobilisasi semua kerja keras yang dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Komitmen organisasi diharapkan dapat menghasilkan hubungan yang kuat seperangkat hubungan yang relatif luas antara seseorang dan organisasi agar bisa memenuhi target suatu lembaga pemerintah (Astika & Yasa, 2018). Komitmen organisasi yang tinggi menimbulkan perasaan dengan melibatkan pegawai dalam organisasi pemerintah untuk menciptakan rasa memiliki ciptakan keterikatan emosional dengan organisasi untuk pekerjaan di masa depan selalu memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan lembaga (Yuditiya & Rahayu, 2023).

Transparansi adalah langkah penyampaian informasi keuangan secara akurat dan transparan terhadap masyarakat, dengan dasar bahwa masyarakat berhak memahami secara jelas dan menyeluruh bagaimana pemerintah mengelola sumber daya yang tersedia (Zubaidah & Nugraeni, 2023).

Perkembangan yang semakin pesat dan semakin meluasnya penerapan teknologi informasi memberikan peluang perolehan, pengelolaan, dan penggunaan informasi berfungsi mendorong pemerintah daerah agar bersikap adil, transparan, jujur, hingga menyampaikan informasi keuangan secara cepat dan tepat. Kemajuan teknologi yang semakin canggih tentunya sangat mendukung pemerintah daerah untuk mempercepat proses akuntabilitas dan penyampaian laporan keuangan kepada para pengguna informasi tersebut (Satriawan & Dewi, 2020).

Penelitian (Nugroho, 2022) akuntabilitas adalah sebuah bentuk tanggung jawab ditawarkan untuk memberi penjelasan mengenai kinerja dan tindakan badan hukum, pemimpin, atau organisasi

terhadap pihak yang mempunyai wewenang untuk meminta informasi atau pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab keuangan, transparansi, penggunaan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat mempengaruhi pengelolaan dana desa. Peneliti berharap dengan menggali lebih jauh aspek-aspek tersebut, dapat ditemukan pengembangan wawasan yang berguna dalam menangani dana desa secara lebih efektif di masa mendatang.

Partisipasi masyarakat sangat berperan penting agar bisa meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa hingga memperkuat pengawasan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Atiningsih & Ningtyas, 2019). Penelitian ini bertujuan mengkaji peran partisipasi masyarakat sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara komitmen organisasi, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilaksanakan di seluruh desa di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Stewardship

Paradigma yang menjadi landasan penelitian ini, menggunakan teori stewardship dari *agency theory* (Lex Donaldson, 1991). Teori ini memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai keadaan dimana manajer memprioritaskan tujuan utama organisasi di atas kepentingan pribadinya. Pemilihan teori stewardship dalam penelitian ini didasarkan pada persepsi manajer sebagai steward atau pengembal amanah.

Berdasarkan teori stewardship, manajer dalam organisasi dipandang sebagai individu yang bertindak dengan kesadaran, perhatian, dan kebijaksanaan untuk memberikan manfaat bagi organisasi. Penelitian ini mengeksplorasi praktik pengelolaan keuangan desa yang efektif, pemerintah desa berfungsi sebagai penyedia layanan yang mempunyai pertanggungjawaban, menyampaikan informasi penting terhadap organisasi serta pengguna informasi keuangan, secara langsung ataupun melalui perwakilan.

Kerangka kerja tersebut berusaha untuk menjelaskan fungsi pemerintah desa dengan menggambarannya sebagai entitas yang dapat diandalkan yang melayani kepentingan publik dengan menjalankan tugasnya untuk meningkatkan masyarakat. Pemerintah desa bertugas untuk membuat laporan keuangan yang akurat dan mudah dipahami, memastikan transparansi dan akuntabilitas. Laporan-laporan ini harus memenuhi karakteristik utama yaitu relevansi, keandalan, dan daya banding.

### Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi akan terjadi ketika para aparat menunjukkan kepercayaan dan dukungan terhadap misi dan nilai-nilai organisasi, sehingga terlihat dari sikap dan perilaku yang ditunjukkannya. Komitmen organisasi dapat menunjukkan sejauh mana perangkat desa memihak dan mempertahankan keanggotaan dalam administrasi desa untuk mencapai tujuan dan nilai yang tepat (Matani & Hutajulu, 2020). Hal ini mencakup motivasi yang kuat untuk mengejar tujuan organisasi dan komitmen untuk terlibat dalam jangka panjang dengan organisasi. Menurut Christiawan, Novandalina, dan Setiyaningsih (2023), individu dengan rasa komitmen organisasi yang kuat memperlihatkan persentase pertanggungjawabam yang tinggi terhadap tugas-tugas yang diembannya dan lebih mungkin untuk memberikan layanan yang luar biasa kepada publik. Untuk menumbuhkan loyalitas karyawan secara efektif dan mendorong kinerja yang optimal terhadap tujuan organisasi, sangat penting untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap organisasi (Muttalib, 2022).

### Transparansi

Transparansi mengacu pada penyediaan informasi pemerintah kepada publik, bersama dengan jaminan akses yang mudah terhadap informasi yang tepat dan memadai. Perihal pengelolaan dana desa, transparansi adalah kunci untuk meningkatkan akuntabilitas. Penyajian informasi secara terbuka membuat masyarakat memiliki kesempatan untuk menilai tanggung jawab pemerintah dan meningkatkan kinerja administratif (Dewi, 2019). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa transparansi menawarkan wawasan yang jelas tentang kebijakan, proses pengambilan keputusan, implementasi, dan hasil yang dicapai (Faizzatus Solihah, 2022).

### Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan pemerintah desa untuk mengontrol pendapatan asli daerah (PAD) melalui data statistik yang lebih akurat. Instansi pemerintah dapat mengelola uang desa secara lebih efektif dengan penggunaan teknologi informasi, yang juga mengurangi kemungkinan kesalahan pengelolaan data (Indraswari & Rahayu, 2021). Teknologi informasi menjadi penting sekali dalam mengelola Alokasi Dana Desa secara efektif. Melalui penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan data, potensi kesalahan dalam pengolahan informasi dapat

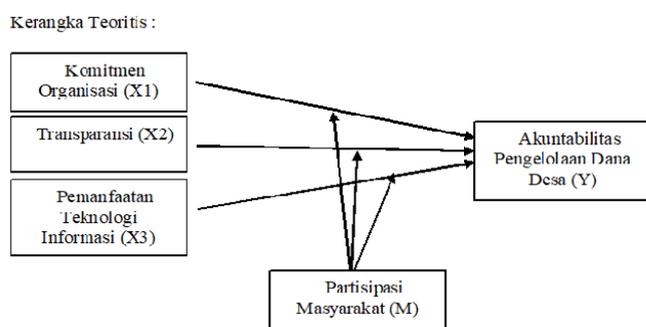
sangat dikurangi. Hal ini disebabkan oleh kemampuan teknologi informasi yang semakin canggih dalam mengolah data dengan presisi dan akurasi yang lebih tinggi (Syafaruddin, 2019).

### Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Terdapat sebuah aspek dari akuntabilitas yakni memastikan bahwa tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya bisa terpenuhi melalui pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang efektif. Di tingkat desa, akuntabilitas menjadi sangat penting karena perangkat desa diharuskan untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan capaian yang sebenarnya terhadap masyarakat. Dengan ini, masyarakat bisa mengevaluasi kinerja pemerintah desa secara lebih objektif (Gayatri, 2019).

### Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat berarti bahwa warga secara aktif terlibat dalam mengidentifikasi masalah dan peluang di dalam komunitasnya, dan secara kolaboratif menemukan solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga mencakup peran mereka dalam menilai modifikasi yang dilakukan (Ade Ayu Anggreni Putri, 2021). Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, keterlibatan mereka dalam mengevaluasi dan mengawasi administrasi dana desa dapat ditingkatkan, sehingga mendorong akuntabilitas yang lebih baik (Matani & Hutajulu, 2020). Kerangka Teoritis :



Gambar 1. Kerangka Teoritis

### Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Ketika mempertimbangkan seberapa besar komitmen dan keterlibatan seseorang dalam organisasi, komponen komitmen organisasi sangat penting. Pengelolaan dana desa dapat lebih bertanggung jawab jika ada semangat dan pengabdian yang tinggi terhadap cita-cita dan tujuan organisasi. Zulkifli (2021) menemukan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan dana desa berkorelasi signifikan terhadap komitmen organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa ketika orang lebih berinvestasi dalam organisasi maka cenderung lebih bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut. Temuan penelitian ini konsisten dengan temuan Riyadi (2024) dan Monica et al. (2024), menunjukkan pengaruh substansial dari komitmen organisasi terhadap akuntabilitas manajemen dana desa. Teori yang dikemukakan stewardship individu yang merasakan rasa memiliki terhadap organisasinya cenderung bertindak secara bertanggung jawab, proaktif, dan berkomitmen untuk mencapai hasil yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Hal ini mengarahkan perumusan hipotesis pertama:

H<sub>1</sub>: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

### Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dalam hal memberitahukan informasi yang relevan dan jelas terhadap para pihak yang berkaitan mengenai kegiatan pemerintah serta kinerja keuangannya, akuntabilitas publik memainkan peran yang sangat penting. Audia dan Mulyani (2023) menemukan jika keterusterangan memiliki peran penting dalam mengupayakan kebenaran dalam melakukan pergerakan tanah. Transparansi mempunyai dampak yang baik dan besar pada akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi uang daerah. Semakin tinggi transparansi, maka semakin baik pemerintah desa dalam mengalokasikan pendapatan daerah (Mualifu, Guspul, & Hermawan, 2019). Selain itu, penelitian Dewi (2019) menemukan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara krusial meningkatkan efisiensi peralihan hak atas tanah di Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Stewardship telah ditetapkan bahwa ketika individu atau kelompok bekerja dalam lingkungan yang transparan, mereka akan lebih mungkin

menjalani tugasnya penuh dengan pertanggungjawaban yang tinggi karena transparansi menciptakan motivasi intrinsik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Adapun hipotesis kedua dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

H<sub>2</sub>: Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Dengan menggunakan peningkatan teknologi, pemerintah daerah dapat meningkatkan teknik yang ada saat ini dalam mengelola data penyimpanan kota. Pengembangan informasi mempengaruhi komitmen organisasi pengelola keuangan daerah (Indraswari & Rahayu, 2021). Penelitian Riyadi dan Kurnadi (2020) menunjukkan bahwa penggunaan pengembangan informasi berdampak pada kewajiban pemerintah kota. Penggunaannya tidak berdampak pada tugas organisasi atau transparansi tentang dana daerah, yang dibuktikan dengan pengungkapan. Hariani et al. (2022) mengamati temuan serupa, yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi yang meluas dalam manajemen tidak menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam akuntabilitas atau transparansi penggunaan keuangan desa. Menurut Ningsih (2021), teknologi informasi dapat membantu Pemerintah Desa (pengurus) melaporkan kepada pemerintah pusat atau masyarakat. Peraturan pemerintah, sistem pengawasan, dan kemampuan mengalokasikan sumber daya manusia merupakan contoh pengaruh tersebut. Dalam konteks Stewardship teknologi informasi tidak hanya sekedar sarana teknis tetapi juga sarana untuk memperkuat nilai-nilai tanggung jawab dan kepercayaan antara pemerintah desa sebagai pelayan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dari studi yakni:

H<sub>3</sub>: Pemanfaatan TI berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

### **Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Terdapat sebuah langkah untuk mengukur keberhasilan pengelolaan dana desa yakni dengan melihat seberapa besar keterlibatan masyarakat. Sejauh mana anggota masyarakat terlibat menunjukkan seberapa baik masyarakat mengelola uangnya. Penelitian (Wastiti dkk., 2022) menunjukkan bahwa masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa memiliki kemauan yang tinggi untuk berpartisipasi, yang dapat memperkuat komitmen organisasi dalam mengelola dana desa yang dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat yang terlibat akan lebih memahami dan memantau penggunaan dana tersebut. Penelitian lain menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, dalam praktiknya, pengaruhnya tidak selalu signifikan. Inisiatif yang direncanakan dapat dilaksanakan tanpa hambatan jika hal ini dilakukan. Dalam teori Stewardship dapat memperkuat komitmen organisasi untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas. Keterlibatan masyarakat juga membangun suasana yang membuat pengelola merasa terdorong dan termotivasi agar mengelola dana desa secara lebih efektif. Sehubungan hal tersebut, berikut ini adalah rumusan hipotesis keempat dari penelitian ini:

H<sub>4</sub>: Partisipasi masyarakat memoderasi pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

### **Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Keterkaitan antara akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa akan memperkuat ikatan antara kedua komponen tersebut. Pengaruh keterbukaan terhadap tanggung jawab pengelolaan dana desa akan lebih terasa pada kondisi di mana keterlibatan masyarakat cukup signifikan dibandingkan dengan kondisi di mana keterlibatan masyarakat rendah. Pada penelitian (Setyaningsih dkk., 2022) dan (Sakdiyah, 2022) bisa ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat berperan sebagai pemoderasi dalam hubungan antara transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan langkah meningkatkan efektivitas pengelolaan melalui transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Perihal ini selaras dengan teori Stewardship, transparansi yang didukung oleh partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas, sesuai dengan nilai-nilai kolektif dan orientasi jangka panjang yang digariskan dalam teori ini. Dengan demikian, rumusan hipotesis kelima pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>5</sub>: Partisipasi masyarakat memoderasi pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

## Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Keterlibatan masyarakat memberikan pengaruh yang besar dalam peningkatan efektivitas penggunaan teknologi informasi untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perihal ini memperlihatkan bahwa dampak teknologi informasi terhadap akuntabilitas menjadi lebih optimal jika terdapat partisipasi aktif masyarakat. Disamping itu, partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi memberi dampak positif yang signifikan terhadap hubungan antara penggunaan teknologi informasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Ridwan, 2023). Pemerintah desa diberi pertanggungjawaban untuk mengelola kas desa secara efektif. Informasi yang akurat dan dapat diandalkan sangat penting bagi perangkat desa dalam upaya mereka untuk mengembangkan berbagai sektor. Aparat desa harus menggunakan keahlian, kemampuan, pemahaman, dan pola pikir mereka untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang optimal (Budiana, Said, & Nursini, 2019). Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Ridwan, Santoso, Suharto, & Putri (2023), sangat penting bagi perangkat desa untuk menunjukkan rasa tanggung jawab ketika mengelola keuangan desa. Hal ini memerlukan keterampilan teknologi informasi yang mumpuni untuk memastikan akses yang mudah terhadap informasi mengenai operasional desa. Menekankan bahwa perangkat desa (stewards) berposisi sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya desa demi kepentingan masyarakat. Dengan ini, hipotesis keenam dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>6</sub>: Partisipasi masyarakat memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan menggunakan pendekatan penelitian lapangan. Metode kuantitatif diadopsi dengan data yang dikumpulkan melalui survei yang dikirim ke administrator desa di 20 desa di Kecamatan Cilongok dengan menggunakan kuesioner offline. Metode pengambilan sampel melalui teknik sampel purposif, penelitian ini mensurvei pemerintah desa yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan tahunan. Secara keseluruhan, 204 responden dari 20 desa di Kecamatan Cilongok berpartisipasi dalam survei ini. Adapun kriteria disesuaikan dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018, sehingga dapat ditetapkan responden pada penelitian ini termasuk aparat desa yang menjabat sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Keuangan, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, dan Kasi Pemerintahan. Karena mereka mempunyai peran kunci, pengetahuan, pemahaman, akses informasi, dan kemampuan untuk memberikan jawaban yang terkait dengan variabel penelitian penelitian ini mensurvei pemerintah desa yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan tahunan. Secara keseluruhan, 135 orang dari 20 desa di Kecamatan Cilongok berpartisipasi dalam survei ini. Adapun akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan variabel dependen, sementara partisipasi masyarakat bertindak sebagai mediator, dan faktor independennya adalah komitmen organisasi, transparansi, dan pemanfaatan teknologi.

Smart PLS 3 dimanfaatkan sebagai alat analisis pada penelitian ini. Penulis melaksanakan uji coba terhadap outer dan inner model. Hasilnya, diperoleh metrik seperti reliabilitas komposit, validitas diskriminan, outer loading, dan average variance extracted (AVE) pada outer model. Sementara itu, nilai R-squared dan pengujian hipotesis ditempatkan di inner mode

**Tabel 1. Operasional Variabel**

Variabel	Indikator Pengukuran	Sumber
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Perencanaan	(Nur Khasanah, 2019)
	Pelaksanaan	
	Pelaporan dan Pertanggungjawaban	
Komitmen Organisasi	Afektif	(Nila Nur Kholifah, 2020)
	Keberlanjutan	
	Normatif	
Transparansi	Penyedia akses informasi	(Nur Khasanah, 2019)
	Musyawarah	
	Keterbukaan Pengelolaan	
	Keterbukaan Dokumen	

Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tersedia perangkat keras dan perangkat lunak pendukung	(Nur Khasanah, 2019)
	Tersedia jaringan internet yang memadai	
	Proses terkomputerisasi	
	Dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan	
Partisipasi Masyarakat	Pengambilan keputusan	(Selinda Rahmaindah, 2022)
	Penyusunan Anggaran	
	Pelaksanaan anggaran	

Sumber: Data diolah (2024)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Responden

Guna mengumpulkan data untuk penelitian ini, kuesioner dikirimkan kepada setiap anggota perangkat desa yang secara rinci terlampir pada gambar 2. Dari seluruh kuesioner yang disebarkan, 135 kuesioner dikembalikan. Berdasarkan data yang terkumpul dari kuesioner, berikut profil responden pada penelitian ini.

**Tabel 2. Profil Responden**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	108	80
Perempuan	27	20
<b>Pendidikan</b>		
SMA	74	55
D3	10	7
S1	48	36
S2	3	2
<b>Jabatan</b>		
Kasi Pemerintahan	18	13
Kasi Pelayanan	19	14
Kasi Kesejahteraan	18	13
Ka.Umum dan Perencanaan	20	15
Kepala Keuangan	20	15
Skretaruis Desa	20	15
Kepala Desa	20	15

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 2, responden terbanyak adalah laki-laki sebanyak 108 orang dengan persentase 80%. Berdasarkan data tersebut bahwa aparat desa didominasi oleh laki-laki. Berdasarkan pendidikan didominasi oleh SMA sebanyak 74 orang dengan persentase 55%. Hal ini menandakan bahwa aparat desa didominasi dengan jenjang Pendidikan tamatan SMA. Sedangkan untuk jabatan memiliki tingkat persentasi yang seimbang.

## PEMBAHASAN

### Evaluasi model pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi model pengukuran pastinya mempunyai tujuan, dalam istilah lain disebut outer model adalah untuk menentukan validitas dan ketergantungan model. Evaluasi outer model berbasis indikator reflektif dilakukan dengan mengukur reliabilitas komposit blok indikator dan koefisien Cronbach's alpha, serta memeriksa validitas konvergen dan diskriminan indikator, yang secara bersama-sama membentuk konstruk laten (Ghozali, 2015:73). Hal ini masuk akal jika dilihat dari tujuan penelitian ini:

#### 1. Outer Model Validitas

Guna memastikan bahwa data yang digunakan valid, maka dilaksanakan evaluasi validitas melalui pengujian terhadap nilai loading factor dari masing-masing indikator. Indikator dianggap valid jika nilai loading factor-nya mencapai atau melebihi 0,7. Dalam penelitian ini, penjelasan mengenai hal tersebut bisa terlihat dalam tabel ini:

Tabel 3. Hasil Faktor Loading

Kontruks	X1	X2	X3	Y	Z	Keterangan
X1_1	0,896					Valid
X1_2	0,823					Valid
X1_3	0,775					Valid
X1_4	0,828					Valid
X1_5	0,871					Valid
X1_6	0,733					Valid
X2_1		0,772				Valid
X2_2		0,866				Valid
X2_3		0,870				Valid
X2_4		0,879				Valid
X2_5		0,865				Valid
X2_6		0,726				Valid
X3_1			0,773			Valid
X3_2			0,704			Valid
X3_3			0,881			Valid
X3_4			0,714			Valid
X3_5			0,719			Valid
X3_6			0,899			Valid
Y1				0,907		Valid
Y2				0,891		Valid
Y3				0,757		Valid
Y4				0,765		Valid

Kontruks	X1	X2	X3	Y	Z	Keterangan
Y5				0,801		Valid
Y6				0,750		Valid
Y7				0,761		Valid
Y8				0,898		Valid
Z1					0,709	Valid
Z2					0,709	Valid
Z3					0,918	Valid
Z4					0,901	Valid
Z5					0,917	Valid

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel 3,menunjukkan bahwa semua item pada variable penelitian ini dianggap valid. Hal ini disebabkan karena semua item telah memenuhi kriteria validitas dengan nilai loading factor yang melebihi 0,700.

2. Outer Model Reliabilitas

Selanjutnya, peneliti menguji nilai cross loading dan membandingkan nilai root AVE dengan korelasi antar konstruk untuk mengevaluasi validitas diskriminan. Hal ini merupakan langkah kedua dari pengujian reliabilitas. Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai relevansi pengujian tersebut dengan penelitian ini

Tabel 4. Hasil Model Reliabilitas

Kontruks	Cronbach's alpha	(AVE)	Keterangan
X1.	0.903	0.677	Reliabel
X2.	0.910	0.692	Reliabel
X3.	0.874	0.618	Reliabel
Y	0.929	0.670	Reliabel
Z	0.888	0.700	Reliabel

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan table 4, nilai *cross loading* menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara setiap indikator dengan konstruk yang relevan lebih tinggi dibanding koefisien korelasi antara indikator dengan konstruk lain. Terdapat demonstrasi yang berhasil dari validitas diskriminan ketika koefisien korelasi dibandingkan dengan nilai akar AVE.

**Evaluasi model struktural (Inner Model)**

Ghozali (2015) mencatat bahwa bagian integral dari analisis PLS-SEM adalah evaluasi model struktural dalam SmartPLS, yang berpusat pada keterkaitan komponen laten. Langkah-langkah penilaian terdiri dari:

1. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Pengujian ini dilakukan guna memberi gambaran seberapa baik model dalam memprediksi atau menjelaskan data yang diamati. Jika nilainya >0,75 memperlihatkan model yang kuat, antara 0,50 dan 0,75 memperlihatkan model yang cukup kuat, dan di bawah 0,25 menunjukkan model yang kurang memadai.

Tabel 5. Hasil Koefisien Determinasi

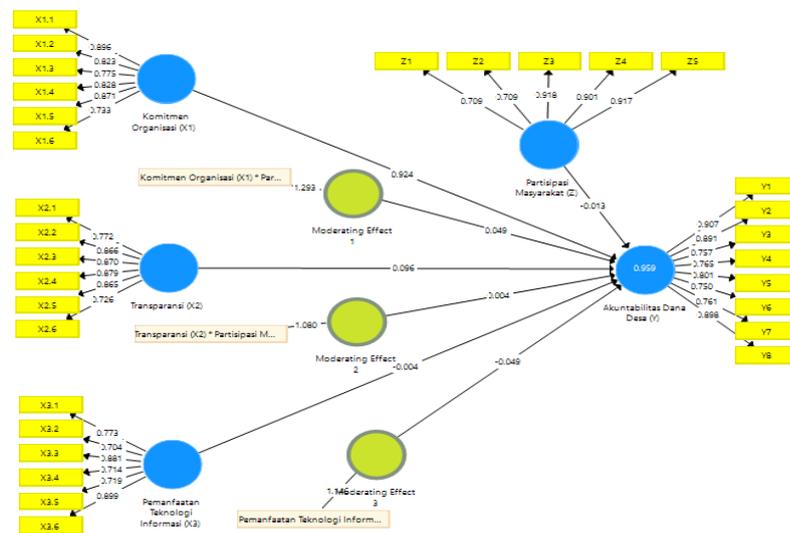
Konstruk Model	R-square	Adjusted R-square
Y	0.959	0.956

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel 5, menunjukkan nilai R-squared penelitian yang dinyatakan dalam persentase adalah 0,959. Perihal ini, artinya angka 95,9% varians dalam variabel dependen bisa dijelaskan oleh faktor independen yang telah dibahas. Selebihnya, terdapat 4,9% varians yang dijelaskan faktor lain. Selain itu, nilai ini dianggap memadai karena melebihi ambang batas 0,75.

2. Uji Hipotesis (Uji t)

Analisis hipotesis bertujuan untuk mengukur signifikansi hubungan antar konstruk dengan menggunakan total effect untuk menilai signifikansi tersebut (Abdillah & Hartono, 2015). Guna memperoleh hasil yang akurat, maka dilakukan proses bootstrapping sebanyak tiga kali.



Tabel 6. Hasil Path Coefficients

Konstruks Model	T-Statistik	P values	Keterangan
X1 -> Y	31.152	0.000	Diterima
X2 -> Y	3.161	0.002	Diterima
X3 -> Y	0.120	0.905	Ditolak
X1Z -> Y	1.025	0.306	Ditolak
X2Z -> Y	0.112	0.911	Ditolak
X3Z -> Y	1.091	0.275	Ditolak

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan pada tabel 6, terlihat dari data bahwa tanggung jawab organisasi mempengaruhi akuntabilitas manajemen dengan signifikan ( $p = 0,000, < 0,05$ ). Dengan ini, komitmen organisasi mempengaruhi akuntabilitas manajemen dana desa. Temuan penelitian membuktikan bahwa keterbukaan pada dasarnya mempengaruhi tanggung jawab pengelola dana desa, dengan nilai  $p < 0,05$ , khususnya  $0,002$ . Karenanya, spekulasi yang menyatakan dampak keterbukaan terhadap akuntabilitas manajemen perusahaan terbukti benar. Tidak adanya hubungan signifikan secara statistik antara penggunaan teknologi informasi dan transparansi pengelolaan dana desa ( $p = 0,905, p > 0,05$ ). Oleh karena itu, bukti ini tidak mendukung klaim bahwa penggunaan teknologi informasi membawa pengaruh terhadap transparansi pengelolaan dana desa. Tidak ada peran mediasi dari partisipasi masyarakat lokal dalam hubungan antara komitmen organisasi dan akuntabilitas manajemen, yang ditunjukkan dengan nilai  $p > 0,05$  atau  $0,306$ . Keterlibatan masyarakat tidak memediasi hubungan antara akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa, dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa  $p$  value  $> 0,05$  ( $0,911$ ). Nilai  $p > 0,05$  tepatnya  $0,911$  menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat bukan merupakan elemen moderasi dalam hubungan antara transparansi dan akuntabilitas pengelola 47 desa. Selain itu, dengan nilai  $p > 0,05$  atau tepatnya  $0,275$ , penelitian ini menunjukkan keterlibatan masyarakat tidak memoderasi hubungan antara akuntabilitas pengelolaan anggaran desa dan penggunaan teknologi informasi.

### **Pengaruh Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Hasil uji hipotesis memperlihatkan bahwa komitmen organisasi membawa pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang sejalan dengan temuan penelitian Riyadi (2024), ikut mengungkapkan pengaruh signifikan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan serupa juga dilaporkan Monica et al. (2024), menegaskan adanya pengaruh signifikan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Tanggungjawab seorang individu secara umum akan meningkat ketika orang merasa puas dan senang dalam melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya tanpa adanya tekanan dari atasan. Temuan ini tidak hanya sesuai dengan tulisan saat ini, namun juga sesuai dengan gagasan tanggung jawab yang diajukan oleh Cavoukian et al. dalam Riyadi (2024). Gagasan ini menggabungkan lima komponen utama tanggung jawab seperti kewajiban otoritatif untuk bertanggung jawab dan pelaksanaan strategi ke dalam sesuai standar dari luar, instrumen untuk melaksanakan pendekatan perlindungan, termasuk perangkat, persiapan, dan pelatihan; kerangka kerja untuk pemeriksaan, pengawasan, dan konfirmasi dari dalam dan luar; keterusterangan dan sistem untuk dukungan individu, serta sarana untuk mediasi dan otorisasi dari luar. Melalui cara ini, pencapaian tujuan otoritatif yang ideal membutuhkan tanggung jawab dari setiap orang dalam asosiasi.

Teori Stewardship menyatakan bahwa manajer akan bertindak sebagai pelayan (steward) yang bertanggung jawab atas aset yang mereka kendalikan. Komitmen organisasi yang positif akan meningkatkan motivasi dan dedikasi aparat desa untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perihal ini sesuai dengan gagasan bahwa komitmen organisasi meningkat ketika individu merasa puas dan senang dalam melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya tanpa tekanan dari atasan.

### **Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Hasil uji hipotesis memperlihatkan bahwa transparansi membawa dampak positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang sejalan dengan temuan Riyadi (2024), menemukan bahwa transparansi secara umum mempengaruhi akuntabilitas dalam administrasi dana desa. Temuan Audia dan Mulyani (2023) menguatkan dampak keterbukaan terhadap administrasi pendapatan desa.

Penelitian ini mendukung teori Stewardship yang menggarisbawahi pentingnya melakukan kewajiban dan tanggung jawab dengan arah untuk mencapai tujuan hirarkis demi keuntungan jangka panjang, tidak hanya untuk kepentingan individu. Pemerintah desa memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menyelesaikan kewajibannya dengan lugas sesuai dengan pedoman dan standar yang relevan agar tujuan bersama dapat tercapai (Diansari et al., 2023). Tingkat keterbukaan yang tinggi dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah desa akan membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Kondisi tersebut terjadi karena transparansi yang tinggi akan mendorong terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana, sebagai akibat dari terstrukturanya rencana pengeluaran hingga pemanfaatan aset desa.

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Hasil uji hipotesis memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak membawa pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang sejalan dengan temuan Rivadi dan

Kurnadi (2020) yang mengatakan tidak adanya hubungan antara penggunaan teknologi informasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hariani et al. (2022) turut menguatkan temuan ini, dengan menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara penggunaan TI dan transparansi dalam penganggaran desa. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan akses, kurangnya keterampilan dan pemahaman aparatur desa tentang teknologi informasi (Pahlawan dkk., 2020). Selain itu, dalam hal pemantauan dan pelaporan laporan keuangan dana desa, pihak berwenang cenderung tidak memiliki peralatan komputer terbaik yang dapat menyebabkan penggunaan teknologi informasi yang kurang ideal. Padahal di era teknologi yang berkembang pesat ini, pemerintah desa idealnya sangat bergantung pada teknologi informasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Dalam teori *stewardship* ini keterbatasan rasional dan kepentingan bersama manajer dan pemilik juga merupakan pertimbangan signifikan. Dalam situasi ini, keterbatasan akses dan keahlian perangkat desa dapat dipahami sebagai keterbatasan rasionalitas yang mengganggu kapasitas pengelola desa untuk menggunakan teknologi informasi dengan sukses. Selain itu, batasan ini mencegah pengelola dan pemilik mencapai tujuan bersama untuk meningkatkan tanggung jawab dalam administrasi dana desa.

### **Efek Moderasi Partisipasi Masyarakat pada Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Hasil uji hipotesis memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat tidak dapat berperan sebagai pemoderasi dalam hubungan antara komitmen organisasi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa tetap tidak dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat menggambarkan bagaimana setiap individu dalam organisasi telah gagal memenuhi standar akuntabilitas yang telah ditetapkan. Temuan ini sejalan dengan (Irmawati, 2022) sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa entitas yang terlibat dalam audit memenuhi standar akuntabilitas, penganggaran partisipatif diperlukan dalam pelaksanaannya. Namun, partisipasi masyarakat menjadi tidak efektif sebagai faktor pendistribusian dana. Yang menjadi penyebabnya karena tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan. Pembangunan wilayah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, akibatnya warga desa cenderung apatis terhadap proses pemerintahan (Pramuktisari & Yuliatmojo, 2022).

Teori *stewardship* juga menekankan betapa pentingnya hubungan antara pelayan dan pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya bertindak sebagai pelayan yang bertanggung jawab, partisipasi masyarakat tidak dapat memperkuat dalam mengontrol komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Efek Moderasi Partisipasi Masyarakat pada Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Hasil uji hipotesis memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat tidak dapat berperan sebagai pemoderasi dalam hubungan antara transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Setyawati, 2020) kurangnya keterlibatan masyarakat dalam memantau keterbukaan pengelolaan keuangan desa menjadi alasan mengapa partisipasi masyarakat tidak berperan sebagai pemediasi. Masyarakat tidak dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan karena ketidaktahuan masyarakat terhadap proses pengelolaan keuangan publik. Selain itu, masyarakat merasa tidak perlu menyuarkan kritik atau memantau proyek pembangunan karena mereka percaya bahwa pemerintah akan melakukan pekerjaannya dengan baik (Pramuktisari & Yuliatmojo, 2022).

Teori *Stewardship* menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Temuan penelitian ini memberitahu bagaimana efisiensi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dapat terhambat oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dan ketidaktahuan masyarakat umum tentang proses pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dapat ditingkatkan, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam administrasi keuangan desa.

### **Efek Moderasi Partisipasi Masyarakat pada Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Hasil uji hipotesis memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat tidak mempunyai peranan sebagai pemoderasi dalam hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Daerah pedesaan cenderung memiliki akses yang kurang memadai terhadap teknologi, yang mempersulit keterlibatan masyarakat dalam mengontrol penggunaan teknologi informasi. Menurut PP No. 56/2005, pemerintah pusat dan daerah diharuskan untuk mengembangkan

dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mengawasi pelaksanaan proses pembangunan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (Sarah et al., 2020). Kurangnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan disebabkan oleh terbatasnya akses ke internet atau program-program yang dapat membantu administrasi dana desa (Pramuktisari & Yuliatmojo, 2022). Selain itu, karena infrastruktur teknis yang tidak memadai atau tidak dapat diandalkan, komunikasi dan hiburan adalah penggunaan utama teknologi informasi di lokasi pedesaan.

Masyarakat belum dapat berpartisipasi penuh dalam menggunakan teknologi informasi untuk membuat administrasi keuangan desa menjadi lebih akuntabel. Dalam teori Stewardship karena menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat, akses, dan penggunaan teknologi informasi masih terbatas, sehingga tidak dapat mencapai akuntabilitas yang tinggi seperti yang diharapkan oleh teori Stewardship.

## KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelitian, ditemukan adanya korelasi yang kuat antara komitmen organisasi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya, ketika anggota merasa puas dan nyaman saat menjalani aktivitas tugas dan tanggung jawabnya tanpa campur tangan pimpinan, maka komitmen yang kuat dalam organisasi akan tumbuh. Selain itu, transparansi sangat mempengaruhi bagaimana dana desa dikelola. Disisi lain pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh secara signifikan, perihal ini bisa terjadi karena kurangnya perencanaan yang matang dan keterampilan aparat desa yang tidak maksimal dapat mengurangi potensi manfaat teknologi. Dalam penelitian ini, tidak ada efek moderasi atau memperkuat dari partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan komitmen organisasi, transparansi, dan penggunaan teknologi.

Mengingat penelitian ini memiliki batasan yang harus ditangani oleh peneliti selanjutnya, seperti lokasi, waktu penelitian, dan variabel penelitian. Adapun saran untuk peneliti selanjutnya yaitu diperlukan adanya mekanisme pengawasan internal, fungsi badan pengawas keuangan, dan kebijakan peraturan tambahan yang perlu dipertimbangkan oleh para akademisi dalam merencanakan penelitian lebih mendalam tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adapun beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan untuk penelitian di masa yang akan yakni melakukan perbandingan metode pengelolaan dana desa dan variabel-variabel yang membentuknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., Hartono. (2015). Partial Least Square (PLS). Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan*.
- Ade Ayu Anggreni Putri, I. W. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*.
- Alfa Forna Regga, S. A. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Peran Perangkat Desa Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Dan Entrepreneur*.
- Anggie Rizka S, Z. M. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Ja. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi Vol. 6 No. 3 Juli-September 2021: 136-148*.
- Budiana, D. A., Said, D., & Nursini. (2019). The Effect Of Village Device Competencies And Internal Control System On Accountability Of Village Management. *Scientific Research Journal (Scirj)*.
- Budiati, Y. (2019). Pengaruh Gcg Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*.
- Christiawan, D. G., Novandalina, A., & Setiyaningsih, A. D. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Mediasi. *Solusi : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*.
- Dewi, C. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol. *Bomba: Jurnal Pembangunan Daerah*.

- Dewi, C. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol. *Bomba: Jurnal Pembangunan Daerah*.
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (2016). *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014*.
- Faizzatus Solihah, B. A. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Risma*, 139-140.
- Gayatri. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 26, 1269–1298.
- Hasanah, N. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Di Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat). *Universitas Islam Negeri Walisongo*.
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Irmawati. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasita*.
- Lex Donaldson, J. H. (1991). Stewardship Theory Or Agency Theory. *Australian Journal Of Management*.
- Matani, C. D., & Hutajulu, L. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung Dikota Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*.
- Mualifu, Guspul, A., & Hermawan. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemernitah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal Of Economic, Business And Engineering*.
- Muttalib, S. (2022). Pengaruh Efektivitas Dana Desa, Aparatur Desa Dan Komitmen Organisasi Terhadap Peningkatan Kinerja Organisasi Perangkat Desa Di Kawasan Pesisir Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju. 31-32.
- Nugroho, P. S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*.
- Putri Thalia Nadia, R. C. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara). *Citra Sosial Humaniora (Cishum)*.
- Ridwan, M. (2023). Peran Moderasi Partisipasi Masyarakat Pada Hubungan Kompetensi Pengelola, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Equilibrium*.
- Ridwan, M., Santosa, R. E., Suharto, S., & Putri, A. P. (2023). Peran Moderasi Partisipasi Masyarakat Pada Hubungan Kompetensi Pengelola, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Equilibrium*, 99-100.
- Sakdiyah, L. R. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Bangsri). *Universitas Tidar*.
- Sarah, S., Taufik, T., & Safitri, D. (2020). He Effect Of Aparatur Competency, Organizational Commitment, Utilization Of Information Technology, Community Participation And Internal Control System Of The Accountability Of Villagemanagement In Kabupaten Indragiri Hulu. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Satriawan, G., & Dewi, G. (2020). Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Pengendalian Intern, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10.
- Setianingsih, N. A., Wiwiek, A. K., & Putranti, E. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*.

- Setyawati, E. S. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Dan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat ( Studi Kasus Pada Kecamatan Reban Kabupaten Batang).
- Sundanah, Pravasanti, Y. A., & Pardanawati, S. L. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparat, Komitmen Organisasi Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa . *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Binis*.
- Syafaruddin, A. R. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Takalar. *Equity: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*.
- Wastiti, A., Purnaweni, H., & Rahman, A. Z. (2022). Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*.
- Yuditiya, A. I., & Rahayu, S. (2023). Kompetensi Sdm, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Spip Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi: Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (Jak)*, 204-205.
- Yusnita , M., & Salfutra, R. D. (2021). Mengukur Kinerja Pengeolaan Dana Desa Berbasis Kompetensi Melalui Partisipasi Sebagai Variabel Moderasi . *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (Jrmsi)*.
- Zubaidah, A. N., & Nugraeni. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jimea (Jurnal Ilmiah Mea(Manajemen, Ekonomi,Dan Akuntansi))*, 981-982.
- Zulkifli. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim . *Jembatan (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, Dan Akuntansi)* , 35.